

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Pascasarjana FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Brotodiharjo, R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Sinar Baca, Jakarta, 1978.
- Dewi, Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Endhesaw, Andssava, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Dania Satya Surya, Jakarta, 2014.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2007.
- Haula, Rosdiana, dan Titi Puswati Putranti, *Teori Pajak Pertambahan Nilai. (kebijakan dan implementasinya di indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Hutagaol, John, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Judisseno, Rimsky, *Pajak dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Kewirausahaan Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kensil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Lubis, Melisa Rahmaini, *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Grafika Utama, Yogyakarta. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Tambunan, Tulus T.H, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Saidi, Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010.
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Suandy, Erly, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Swastha, Basu, *Pengantar Bisnis Modern*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Waluyo dan Wirawan B, Ilyas. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Widjaja, Gunawa, *Jual Beli*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Zulkarnain, *Ilmu Menjual Pendekatan Teoritis & Kecakapan Menjual*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jasa-Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2019 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ /2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli.

Jurnal:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, *Pajak Penghasilan*, Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2010.

Khulwah, Juhrotul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016

Li, Jinyan, *E-commerce Tax Policy in Australia, Canada, and United States*, *Jurnal Australasian Legal Information Institute (AustLII)*, Australia, 2000.

Sahabuddin, S, *Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-commerce Pendekatan Komparatif*, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Jambi, 2017.

Soebagjo, Felix Oentoeng, *Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan dan Distributor*, *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-27 No.3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Wawancara:

Hasil wawancara langsung dengan pemilik *online shop DC*, Wawancara pada tanggal 1 Mei 2019.

Website:

www.kumparan.com

www.kemendikbud.go.id

www.kemenkeu.go.id

www.binus.ac.id

www.investor.co.id

www.wartaekonomi.co.id

www.katadata.co.id

www.cnbcindonesia.com